

## Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam peningkatan kinerja Kelompok Perhutanan Sosial di Delta Mahakam

Syahrani Ahmad<sup>1</sup>, Mustofa Agung Sardjono<sup>2\*</sup>, Setiawati<sup>2</sup>, Emi Purwanti<sup>2</sup>, Rochadi Kristiningrum<sup>2</sup>, Ali Suhardiman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Jalan Penajam, Samarinda 75123

<sup>2</sup> Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Jalan Penajam, Samarinda 75123

\*E-Mail: [masardjono@fahatan.unmul.ac.id](mailto:masardjono@fahatan.unmul.ac.id)

Artikel diterima : 06 Juli 2023 Revisi diterima 05 Maret 2024

### ABSTRACT

The role of the FMU in assisting or facilitating local communities is so important, because there are several policies implementing Social Forestry challenges now, with limitations on the number of Forestry Extension Workers who often build more than 1 Social Forestry Business Group (KUPS) of course be a problem in itself. In general, this study aims to measure the positive role of the KPHP Delta Mahakam on local KPS performance, especially in terms of area management. The research was conducted for 3 months from January to March 2023 in the Delta Mahakam KPHP work area. The methods used are literature studies, observation, questionnaires, and interviews. Statistical data analysis techniques for processing information used the IBM SPSS Statistics 25 program, and instrument tests and classical tests were carried out followed by multiple regression analysis to determine the relationship between the independent variables and the dependent variable. The total number of respondents in this study were 78 people who were then divided into two clusters, namely cluster A and cluster B as a comparison sample or control variable. The results showed that the role of KPH and the effectiveness of forestry extension agents simultaneously had a direct effect on the performance of KPS Cluster A and Cluster B. The results of the calculation of the coefficient of determination (R<sup>2</sup>) showed that 63.30% of the variation in the dependent variable of KPS Cluster A performance in managing the area was explained by the independent variable Role KPH and the Effectiveness of Forestry Extension. Whereas in Cluster B it was found that the variation in KPS performance in managing the Area was explained by the variable Role of the FMU and the Effectiveness of Forestry Extension as much as 28.60%

**Keyword:** Role, KPH, forestry extension workers, KPS performance, area management

### ABSTRAK

Peran dari KPH dalam pendampingan atau memfasilitasi masyarakat lokal menjadi demikian penting, karena terdapat beberapa tantangan implementasi kebijakan Perhutanan Sosial saat ini, dengan keterbatasan jumlah Penyuluh Kehutanan yang sering membina lebih dari 1 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) tentunya menjadi permasalahan tersendiri. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengukur peran positif dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/KPHP Delta Mahakam terhadap kinerja KPS setempat, terutama dalam hal Kelola kawasan. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan dari Januari s.d. Maret 2023 di wilayah kerja KPHP Delta Mahakam. Metode yang digunakan adalah studi literatur, observasi, angket (kuesioner) dan wawancara. Teknik analisis data statistik untuk mengolah informasi menggunakan program IBM SPSS Statistic 25, dan dilakukan uji instrumen dan uji klasik dilanjutkan analisis regresi berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Total responden dalam penelitian ini sebanyak 78 orang yang dibagi menjadi dua klaster yaitu klaster A dan klaster B sebagai sampel pembandingan atau variabel control. Hasil penelitian menunjukkan Peran KPH dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan secara simultan berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja KPS Klaster A maupun Klaster B. Hasil perhitungan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan bahwa 63.30% variasi dalam variabel terikat kinerja KPS Klaster A dalam Kelola kawasan dijelaskan oleh variabel bebas Peran KPH dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan. Sedangkan pada Klaster B diperoleh bahwa variasi dalam variabel kinerja KPS dalam kelola Kawasan dijelaskan oleh variabel Peran KPH dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan sebanyak 28.60%.

**Kata kunci :** Peran, KPH, penyuluh kehutanan, kinerja KPS, kawasan

### PENDAHULUAN

Sejarah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan sudah dimulai sejak lama yaitu sekitar tahun 1960an meskipun saat itu masih terfokus pada kawasan hutan di Pulau Jawa yang umumnya

dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perhutani dengan sistem hutan tumpang sari. Perhutani terus mengembangkan berbagai skema pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas pengelolaan hutan, mulai dari upaya pengembangan agroforestri di awal tahun 80-an

setelah Kongres Kehutanan se-Dunia VIII (1978) di Jakarta dengan tema *Forest for People*, selanjutnya setelah reformasi pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/PHBM di tahun 2001, hingga akhirnya terintegrasi dalam program Perhutanan Sosial dengan berbagai skema pengelolaan, Perhutanan Sosial pernah juga diujicobakan di Jawa di awal dasawarsa 80-an dalam kerangka kerjasama antara Perhutani dengan Ford Foundation (Sardjono, 2006).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Sedangkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, Kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya (Permenhut\_9, 2021).

Peran dari KPH dalam memfasilitasi masyarakat lokal menjadi demikian penting, karena terdapat tantangan implementasi kebijakan Perhutanan Sosial saat ini: (1) Kepastian alokasi lahan hutan; program Perhutanan Sosial (khususnya HKm, HD dan HTR) selama ini memiliki lokasi areal terbatas dan tersisa sehingga sering tidak menarik keterlibatan masyarakat, karena hampir keseluruhan kawasan Hutan Produksi sudah dibebani hak atau izin pemanfaatan hasil hutan atau penggunaan kawasan; (2) Perhutanan Sosial melibatkan keluarga masyarakat skala kecil yang umumnya memiliki keterbatasan kapital uang, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), fisik, kelembagaan, dan sosial; (3) Program Perhutanan Sosial membutuhkan partisipasi masyarakat lokal (desa/kampung) dan koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah (Sardjono, 2017; 2019).

Dalam upaya pencapaian target alokasi Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta Ha di seluruh Indonesia, maka bukan hanya luasannya saja yang

harus terpenuhi, melainkan juga penting memfungsikan Kelompok Tani Hutan/KTH dan juga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Dengan tuntutan ini peran pendamping Perhutanan Sosial sangat penting.

Secara umum penelitian ini bertujuan:

1. Mengukur dan menganalisis peran KPHP Delta Mahakam terhadap kinerja KPS dalam mengelola Kawasan di KPHP Delta Mahakam.
2. Mengukur dan menganalisis efektivitas Penyuluh Kehutanan dengan kinerja KPS di KPHP Delta Mahakam.
3. Mengukur dan menganalisis korelasi antara peran KPHP Delta Mahakam dan efektivitas Penyuluh Kehutanan dengan kinerja KPS di KPHP Delta Mahakam.

Sesuai dengan Rumusan Masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hipotesis optimistik yang dibangun dalam penelitian ini, adalah:

1. KPHP Delta Mahakam memiliki peran signifikan terhadap kinerja pengelolaan kawasan oleh KPS setempat;
2. Kegiatan Penyuluh Kehutanan secara signifikan mampu/efektif dalam meningkatkan kinerja KPS setempat dalam pengelolaan kawasan;
3. Terdapat korelasi positif antara peran KPHP Delta Mahakam dan efektifitas Penyuluh Kehutanan dengan kinerja KPS setempat dalam mengelola kawasan hutan.

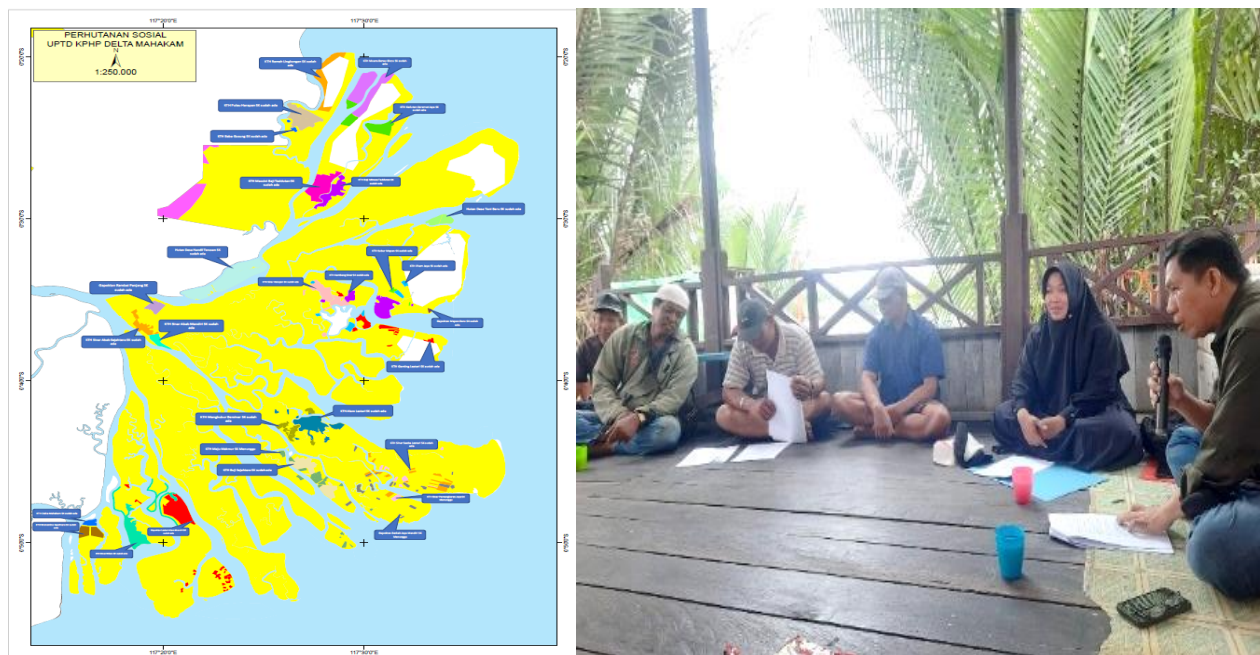
## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KPHP Delta Mahakam yang memiliki luasan ±113.553,66 Ha, tepatnya dalam wilayah administrasi Kecamatan Muara Badak, kecamatan Anggana dan di Kecamatan Muara Jawa. Penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang 3 bulan pada bulan Januari s.d. Maret 2023.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Perhutanan Sosial di Kecamatan Muara Badak sebanyak 7 KPS seluruhnya skema IUPHKm (Hutan Kemasyarakatan), kemudian di kecamatan Anggana sebanyak 15 KPS dengan skema IUPHKm dan Hutan Desa, dan di Kecamatan Muara Jawa sebanyak 4 KPS dengan skema IUPHKM. Jumlah Kepala Keluarga dari seluruh pemegang persetujuan tersebut berjumlah 833 Kepala Keluarga.



**Gambar 1.** Lokasi wilayah penelitian serta proses pengumpulan data di KPS

**Tabel 1.** Data Kelompok Perhutanan Sosial di KPHP Delta Mahakam

No.	Kecamatan	Desa/kelurahan	Nama KPS	Luas (ha)	Jml KK	Tanggal SK	Klaster
1	Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	KTH Delta Mahakam	68	20	30/12/2019	A
2	Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	KTH Wanamina Sejahtera	175	25	30/12/2019	
3	Anggana	Kutai Lama	KTH Sinar Abab Mandiri	126	19	30/03/2021	
4	Anggana	Kutai Lama	KTH Sinar Abab Sejahtera	196	28	30/03/2021	
5	Anggana	Muara Pantuan	KTH Genting Lestari	246	22	30/03/2021	
6	Anggana	Muara Pantuan	KTH Subur Mapan	27	20	30/03/2021	
7	Anggana	Muara Pantuan	KTH Sinar Harapan	401	27	30/03/2021	
8	Anggana	Muara Pantuan	KTH Kembang Sinar	473	30	30/03/2021	
9	Anggana	Muara Pantuan	KTH Ilham Jaya	156	15	30/03/2021	
10	Muara Badak	Muara Badak Ulu	KTH Ramah Lingkungan	382	26	22/10/2021	
11	Anggana	Handil Terusan	LPHD Desa Handil	1,148	16	22/11/2021	B
12	Muara Badak	Salo Palai	KTH Pulau Harapan	525	36	24/12/2021	
13	Muara Badak	Muara Badak Ulu	KTH Muara Berau Bicc	825	58	24/12/2021	
14	Anggana	Sepatin	KTH Buji Sejahtera	450	30	28/03/2022	
15	Anggana	Sepatin	KTH Sinar Saeba Lestari	198	22	28/03/2022	
16	Anggana	Sepatin	KTH Mangkubur Bersinar	210	20	28/03/2022	
17	Anggana	Sepatin	KTH Alam Lestari	513	39	28/03/2022	
18	Anggana	Muara Pantuan	Gapoktanhut Mapan Baru	12	89	28/03/2022	
19	Anggana	Kutai Lama	Gapoktanhut Rambai Panjang	148	49	28/03/2022	
20	Muara Badak	Saliki	KTH Maccini Baji Taddutan	522	37	28/03/2022	
21	Muara Badak	Saliki	KTH Baji Minasa Taddutan	326	23	28/03/2022	
22	Muara Jawa	Muara Kembang	KTH Lestari Alam Mandiri	716	57	28/03/2022	
23	Muara Badak	Muara Badak Ulu	KTH Kadutan Keramat Jaya	360	24	28/04/2022	
24	Muara Jawa	Muara Kembang	KTH Sinar Nilam	616	50	28/04/2022	
25	Anggana	Tani Baru	LPHD Tani Baru	190	32	13/05/2022	
26	Muara Badak	Salo Palai	KTH Baba Gusung	21	19	17/05/2022	
				<b>9.030</b>	<b>833</b>		

Penarikan sampel terhadap responden yang berasal dari Kelompok Perhutanan Sosial dilakukan dengan teknik Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, kemudian peneliti membagi sampel penelitian menjadi sampel utama yang disebut klaster A yaitu 13 (tiga belas) unit KPS yang memperoleh Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sejak tahun 2019 s.d 2021 dan sampel pembanding klaster B untuk variabel control dari 13 (tiga belas) KPS yang memperoleh SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada tahun 2022 yang diasumsikan belum mendapatkan pendampingan intensif dibandingkan KPS klaster A. Peneliti mempersempit populasi anggota KPS klaster A maupun B yaitu total sebanyak 833 kepala Keluarga dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin. Sejumlah hasil penelitian menggunakan rumus Slovin untuk mendapatkan ukuran sampel (Tejada dkk., 2012):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

- N = Ukuran jumlah sampel
- N = Ukuran Populasi
- e = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir: e = 0,1

Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel yang diperoleh penelitian ini dengan nilai presisi yang dipilih sebesar 10% sehubungan dengan keterbatasan waktu dan biaya, adalah:

$$n = \frac{833}{1 + 833 * (0,1)^2}$$

$$n = 89,28$$

Dibulatkan menjadi 89.

Dari jumlah sampel 89 tersebut dibagi ke 26 KPS menjadi:

N = 89 : 26 = 3,42, dibulatkan menjadi 3.

Dengan demikian jumlah sampel diambil sebanyak 3 orang dari masing-masing KPS yang dianggap aktif dan berpengaruh terhadap kinerja KPS terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, sehingga total responden seluruhnya dalam penelitian ini sebanyak 78 orang.

#### Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data didapatkan dengan: 1) Studi Literatur, 2) Observasi, 3) Angket (Kuesioner) dan 4) Wawancara (*Interview*).

#### Analisis Data

Hasil tanggapan responden disusun ke dalam suatu tabulasi data yang selanjutnya diolah dan dipresentasikan dalam suatu tabulasi distribusi frekuensi, kemudian tabulasi dianalisis dengan menggunakan program IBM SPSS Statistic 25. Instrumen pengumpulan data penelitian harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik berupa pengujian uji normalitas, asumsi multikolinearitas, linearitas untuk mencari peramalan, dilakukan dengan bantuan software SPSS. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Model persamaan regresi yang bisa dibentuk dalam penelitian ini adalah:

$$S = a + b_1 PK + b_2 EP + e$$

Keterangan:

- S = Kinerja KPS Kelola Kawasan
- a = Nilai Konstanta
- PK = Peran KPH
- EP = Efektivitas Penyuluh
- b1, b2 = Koefisien regresi
- e = Standar error Kriteria Pengujian Hipotesis

#### Kriteria Pengujian Hipotesis

##### Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas (Peran KPH atau Efektivitas Penyuluh Kehutanan) secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kinerja KPS dalam Kelola Kawasan). Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol (Ho: bi = 0), atau hipotesis alternatifnya (Ha) bahwa parameter suatu variabel tidak sama dengan nol (Ha : bi ≠ 0).

Data diolah dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan software IBM SPSS Statistic 25.

##### Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk melihat apakah semua variabel-variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh/signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006). Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah semua parameter dalam model sama dengan nol (Ho : b1 = b2 = ..... = bk = 0), atau hipotesis alternatifnya (Ha) bahwa tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol (Ha : b1 ≠ b2 ≠ ..... ≠ bk ≠ 0),

*Uji Koefisien Determinasi*

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat kedekatan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila nilai koefisien mendekati angka 1, maka variabel bebas makin mendekati hubungan dengan variabel terikat sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut adalah dapat dibenarkan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Peran KPHP Terhadap Kinerja KPS Dalam mengelola Kawasan**

Fokus penelitian ini adalah pada salah satu tugas fungsi KPH yaitu melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial sebagaimana disebutkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peneliti menggunakan Variabel Peran KPH terhadap peningkatan kinerja KPS ke dalam 6 indikator yaitu fasilitasi pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial, fasilitasi rehabilitasi areal Perhutanan Sosial, fasilitasi perlindungan dan pengamanan hutan, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM KPH dan masyarakat, fasilitasi pengembangan usaha produktif, serta pemantauan dan evaluasi.

Secara umum jawaban responden klaster A menunjukkan Peran KPH terhadap kinerja KPS dalam kelola kawasan dipersepsikan positif. Hal ini dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang rata-rata memberikan tanggapan setuju, untuk tanggapan yang ragu-ragu dapat kita temukan hanya beberapa saja, sedangkan tanggapan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ditemukan.

**Tabel 2.** Hasil analisis regresi berganda instrumen variabel peran KPH (X1), efektivitas penyuluh kehutanan (X2) dan kinerja KPS dalam kelola kawasan (Y) pada klaster A

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9.565	6.227		-1.536	0.133
Total Peran KPH	0.622	0.108	0.629	5.760	0.000
Total Efektiv Penyuluh	0.213	0.076	0.304	2.783	0.009

a. Dependent Variable: Total Kinerja KPS

Tabel 2 menunjukkan model persamaan regresi linier berganda pada klaster A sebagai berikut:

$$Y_A = -9,565 + 0,622 X_1 + 0,213 X_2 + e$$

**Tabel 3.** Hasil analisis regresi berganda instrumen variabel peran KPH (X1), efektivitas penyuluh kehutanan (X2) dan kinerja KPS dalam kelola kawasan (Y) pada klaster B

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.692	4.959		2.358	0.024
Total Peran KPH	0.285	0.100	0.420	2.841	0.007
Total Efektiv Penyuluh	0.140	0.091	0.228	1.541	0.132

a. Dependent Variable: Total Kinerja KPS

Klaster B menghasilkan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y_B = 11,692 + 0,285 X_1 + 0,140 X_2 + e$$

Selanjutnya dilakukan uji statistik t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual dalam

menerangkan variasi variabel terikat. Untuk membandingkan nilai t-statistic dan t-tabel dalam penelitian ini, sebelumnya dicari dahulu nilai t-tabel yang diperoleh dari df (degree of freedom) = n-k (k=2, uji dua pihak) dan  $\alpha = 5\%$  (0,05).

Hipotesis dianalisis dengan cara parsial variabel Peran KPH (X1) dan variabel Efektivitas Penyuluh Kehutanan (X2) terhadap variabel Kinerja KPS

Dalam Kelola Kawasan (Y). Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat masing masing satu per satu. Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan uji t, dengan melihat apakah nilai-nilai koefisien yang diperoleh bernilai nyata atau tidak antara

thitung dan ttabel pada tingkat keyakinan 5% atau ( $\alpha=0.05$ ).

Untuk membandingkan nilai t-statistic dan t-tabel dalam penelitian ini, sebelumnya dicari dahulu nilai t-tabel yang diperoleh dari df (degree of freedom) = n-k (k=2, uji dua pihak) dan  $\alpha = 5\%$  (0,05)

**Tabel 4.** Nilai t tabel Dengan Instrumen Dua Variabel Bebas (n=39)

Ttabel = t ( $\alpha/2$ ; n-k-1) = t (0,025; 36)	t tabel (2,02809)
--	-------------------

Hipotesis 1: *KPHP Delta Mahakam memiliki peran signifikan terhadap kinerja pengelolaan kawasan oleh KPS setempat.*

Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Peran KPH (X1) yaitu 5,760 lebih besar dari t tabel yaitu > 2,02809 dan mempunyai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima yang berarti Peran KPH (X1) berpengaruh langsung terhadap Kinerja KPS Dalam Kelola Kawasan (Y) pada klaster A di wilayah KPHP Delta Mahakam.

Sebagai pembanding atau variabel control maka dilakukan perhitungan uji t pada klaster B seperti diperlihatkan pada Tabel 3 dengan hasil bahwa nilai t hitung untuk variabel Peran KPH yaitu 2,841 lebih besar dari t tabel yaitu > 2,02809 dan mempunyai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Peran KPH berpengaruh langsung terhadap Kinerja KPS Dalam Kelola Kawasan pada klaster B di wilayah KPHP Delta Mahakam.

Analisa hasil pengujian hipotesis dengan fakta di lapangan, ditemukan bahwa pada dasarnya peran KPHP Delta Mahakam selaku pemangku kawasan terlihat berpengaruh langsung pada kinerja KPS Dalam Kelola Kawasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, bahwa tupoksi KPH salah satunya adalah melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial. Peran ini dijalankan KPHP Delta Mahakam dan KPH lainnya di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara rutin setiap tahunnya dengan menggunakan dana operasional sebagian besar bersumber dari Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam -Dana Reboisasi (DBH-SDA-DR).

Kegiatan sosialisasi penyiapan Perhutanan Sosial dilaksanakan pada desa-desa yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Muara Jawa. Sasaran kegiatan adalah masyarakat petambak atau kelompok tani yang sudah lama beraktivitas di kawasan hutan Delta Mahakam.

KPH dan Penyuluh Kehutanan memfasilitasi penyusunan proposal usulan Perhutanan Sosial untuk diajukan ke Pokja Perhutanan Sosial dan UPT Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan.

KPHP Delta Mahakam juga memfasilitasi pengembangan KPS pasca diterimanya Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, salah satunya adalah kewajiban penandaan batas wilayah kelola areal Perhutanan Sosial secara partisipatif.

Kewajiban lainnya adalah penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang berlaku selama 10 tahun dan penjabarannya melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan disahkan oleh Kepala UPT BPSKL Wilayah Kalimantan setelah mendapat rekomendasi Kepala KPHP Delta Mahakam.

KPHP Delta Mahakam juga memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan terhadap anggota KPS. KPH berperan menggandeng narasumber yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan KPS, seperti dari Balai Diklat Kehutanan Wilayah Kalimantan, Akademisi, maupun praktisi.

Terkait dengan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dilakukan fasilitasi pendampingan kepada pihak yang akan melakukan kegiatan.

Peran KPH lainnya adalah perlindungan hutan terpadu melalui kegiatan patroli pengamanan hutan dan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melibatkan KPS atau masyarakat di dalam maupun sekitar Kawasan hutan. Demikian pula penyediaan peralatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pelatihan penggunaan peralatan telah difasilitasi KPH setiap tahunnya.

Secara keseluruhan bahwa peran KPH terhadap kinerja KPS, dirasakan sangat berpengaruh langsung dan positif. Hal ini ditunjang dengan tupoksi KPHP Delta Mahakam yang telah diatur Pemerintah Pusat dan Daerah serta adanya penerimaan, pemahaman dan kemauan dari KPS untuk bersinergi dalam upaya pengembangan usaha produktif Perhutanan Sosial.

Pada Klaster B Peran KPH berpengaruh terhadap kinerja KPS Dalam Kelola kawasan,

meskipun pengaruhnya tidak sebesar seperti peran KPH di Klaster A, hal ini disebabkan keberadaan KPS yang lebih muda sehingga intensitas atau lamanya proses pendampingan tentunya berbeda dibandingkan terhadap KPS yang tergabung dalam Klaster A. Walaupun demikian beberapa kegiatan yang menjadi prasyarat penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial di Klaster B telah dilakukan KPHP Delta Mahakam, seperti sosialisasi penyiapan dan SK Perhutanan Sosial di tingkat tapak, mulai dilibatkannya KPS dalam kegiatan penanaman di dalam atau di luar areal KPS oleh para pihak, sosialisasi dan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Hasil dari penelitian terkait peran KPH yang berpengaruh positif terhadap kinerja KPS dalam kelola Kawasan didukung dari hasil penelitian terdahulu (Santoso dkk., 2019) dengan judul Keberterimaan Kelompok Tani Hutan pada Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di KPH Yogyakarta dan KPH Wilayah IX Panyabungan, yang menyatakan pada tingkat partisipasi digambarkan bahwa kematangan organisasi KPH selaras dengan kemandirian KTH menunjukkan korelasi karakteristik internal anggota KTH yang cukup kuat. Contohnya organisasi KPH Yogyakarta yang matang maka diimbangi pula dengan KTH yang mantap.

### **Efektivitas Penyuluh Kehutanan Terhadap Kinerja KPS Dalam Mengelola Kawasan**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peran Penyuluh Kehutanan dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Permenhut\_No.4, 2022).

Peneliti menggunakan Variabel Efektivitas Penyuluh Kehutanan terhadap peningkatan kinerja KPS ke dalam 8 indikator yaitu Jumlah Penyuluh, Wawasan dan Kompetensi, Luas dan aksesibilitas Wilayah Binaan, Penyelesaian masalah/ konflik, Konsultasi Pihak terkait (Pemkab, swasta dan NGO), Karakter Penyuluh, Fasilitas Kemitraan KPS dan Saprasi operasional Penyuluhan. Frekuensi jawaban responden pada variabel Efektivitas Penyuluh Kehutanan diketahui bahwa secara umum jawaban responden klaster A menunjukkan Efektivitas Penyuluh Kehutanan terhadap kinerja KPS dalam kelola kawasan dipersepsikan positif.

Hal ini dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang rata-rata memberikan tanggapan setuju, untuk tanggapan yang ragu-ragu dapat kita temukan hanya beberapa saja, sedangkan tanggapan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ditemukan.

Sementara hasil jawaban responden klaster B menunjukkan Efektivitas Penyuluh Kehutanan terhadap kinerja KPS dalam kelola kawasan dipersepsikan tidak berpengaruh langsung. Hal ini dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang rata-rata memberikan tanggapan ragu-ragu dan tidak setuju.

Hipotesis 2: Kegiatan Penyuluh Kehutanan secara signifikan mampu/efektif dalam meningkatkan kinerja KPS setempat dalam pengelolaan kawasan.

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Efektivitas Penyuluh Kehutanan (X<sub>2</sub>) yaitu 2,783 lebih besar dari t tabel yaitu > 2,02809 dan mempunyai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima yang berarti Efektivitas Penyuluh Kehutanan (X<sub>2</sub>) berpengaruh langsung terhadap Kinerja KPS Dalam Kelola Kawasan (Y) pada klaster A di wilayah KPHP Delta Mahakam. Sedangkan berdasarkan Tabel 3 diketahui variabel Efektivitas Penyuluh Kehutanan pada Klaster B yaitu 1,541 lebih kecil dari t tabel dan mempunyai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penyuluh Kehutanan tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja KPS Dalam Kelola Kawasan pada klaster B di wilayah KPHP Delta Mahakam.

Analisa hasil pengujian hipotesis dengan fakta di lapangan, ditemukan bahwa Penyuluh Kehutanan terlihat berpengaruh pada kinerja KPS dalam kelola Kawasan yang tergabung dalam Klaster A. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Kehutanan melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus pada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembagian wilayah kerja penyuluhan KPHP Delta Mahakam terhadap ketiga Penyuluh Kehutanan turut mendukung efektivitas kegiatan penyuluhan kehutanan di KPHP Delta Mahakam.

Efektivitas Penyuluh Kehutanan didukung oleh pengetahuan dan wawasan yang luas yang diperoleh melalui pelatihan-pelatihan / bimtek dan seminar/webinar kemudian diimplementasikan saat mendampingi pengembangan usaha KPS dalam

Kelola Kawasan, sehingga sebagian besar anggota KPS memperoleh pengetahuan yang cukup pula saat menjalankan pengelolaan Perhutanan Sosial karena selalu didampingi Penyuluh Kehutanan yang semuanya berkualifikasi pendidikan sebagai Sarjana Kehutanan dan bahkan Magister Kehutanan. Penyuluh Kehutanan KPHP Delta Mahakam juga dituntut profesional dan kompeten yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi kompetensi sebagai Penyuluh Kehutanan sebagai tanda telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri LHK RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Efektivitas Penyuluhan Kehutanan antara lain ditentukan luasnya wilayah binaan Penyuluh Kehutanan serta aksesibilitas atau kemudahan menuju lokasi. Didukung dana operasional KPH bersumber dari DBH SDA DR maka Penyuluh Kehutanan secara periodik dapat melakukan pendampingan KTH mulai dari pembentukan, pengembangan kelembagaan, hingga penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial. Penyuluh memfasilitasi KPS untuk memetakan potensi wilayah KPS dan tata ruang / zonasi kemudian menjabarkannya ke dalam RKPS dan RKT.

Penyuluh Kehutanan juga berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintahan desa, kecamatan, termasuk ke Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Harapannya tentunya ada dukungan dari semua pihak terkait untuk secara sinergitas dan kolaboratif turut berpartisipasi mengembangkan usaha produktif Perhutanan Sosial.

Keberterimaan masyarakat terhadap program dan kegiatan Perhutanan Sosial sangat ditentukan oleh peran aktif Penyuluh Kehutanan atau Pendamping Perhutanan Sosial yang mampu menerapkan pendekatan psikologis dan berinteraksi di antara anggota KPS sehingga tercipta rasa kebersamaan, keterbukaan dan kenyamanan dalam mengemukakan pendapat atau masukan dalam rangka pengembangan kelembagaan KPS. Ini tentunya tidak lepas kaitannya dengan karakteristik Penyuluh Kehutanan yang seyogyanya memiliki sifat yang ramah dan komunikatif serta mampu menciptakan kondisi yang mendukung keterbukaan dan partisipatif anggota KPS dalam menyusun perencanaan maupun pengelolaan pengembangan usaha produktif Perhutanan Sosial. Peran Penyuluh Kehutanan pun bertambah maksimal dengan tingginya frekuensi kunjungan ke KPS.

Penyuluh Kehutanan telah menjalankan

tugasnya melalui pengaturan waktu kunjungan dan pendampingan KPS, dan kadang menginap di lokasi kegiatan KPS. Hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan bahwa jarangya intensitas penyuluhan yang dilaksanakan dari penyuluh, tidak terjadwalnya skedul waktu penyuluhan, dan penyuluh yang tidak berada / berdiam di wilayah kelompok tani menyebabkan informasi yang berhubungan dengan kinerja kelompok tani pun menjadi lambat sehingga tentunya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut (Wijaya dkk., 2020).

Terkait pengembangan usaha produktif, KPS sangat berharap peran Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk yang dihasilkan anggota KPS. Dengan adanya harapan yang tinggi terhadap KPS untuk mengembangkan ragam produk baik berupa Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) maupun jasa lingkungan, maka tumpuan pun juga disematkan ke pundak fasilitator untuk memfasilitasi terjalinnya kemitraan dengan pihak lainnya untuk membantu penyaluran / pemasaran produk KPS ataupun sebagai donatur penguatan modal pengembangan usaha. Peran sebagai penyalur pemasaran produk dan penjalin kemitraan inilah yang belum maksimal dilakukan Penyuluh Kehutanan KPHP Delta Mahakam.

KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui dukungan DBH DR memiliki kemampuan untuk melengkapi sarana prasarana operasionalisasi KPH, seperti sepeda motor penyuluh, laptop dan bahkan kapal/speed boat untuk transportasi sungai/laut.

Secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa Penyuluh Kehutanan cukup efektif dalam peningkatan kinerja KPS dalam Kelola Kawasan yang tergabung di Klaster A. Penelitian yang dilakukan Yahya, T, dkk (2021) menunjukkan bahwa peran penyuluh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pemberdayaan Kelompok Tani Hutan, dimana hasil perhitungan Uji R square bahwa peran penyuluh kehutanan memiliki pengaruh sebesar 61,7% dalam mempengaruhi kepuasan pemberdayaan KTH.

Sebagai pembanding dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel responden yang tergabung dalam Klaster B yaitu KPS yang memperoleh SK Perhutanan Sosial di tahun 2022, maka diketahui bahwa Efektivitas Penyuluh Kehutanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja KPS Dalam Kelola Kawasan. Hal ini kemungkinan disebabkan ada kaitannya dengan frekuensi pendampingan yang lebih kecil intensitasnya oleh Penyuluh Kehutanan terhadap



KPS Klaster B yang memang terbentuk lebih muda yaitu di tahun 2022.

Rendahnya intensitas pendampingan KPS di Klaster B akibat keterbatasan tenaga dan waktu Penyuluh Kehutanan. Apalagi ada Penyuluh Kehutanan yang memang memiliki wilayah kerja sangat luas di KPHP menyebabkan tidak semua KPS terutama yang baru terbentuk, langsung bisa didampingi secara intens.

Mengutip tulisan Prof. Hariadi Kartodihardjo dari Katadata (2020), dari hasil survey yang dilakukan terhadap 103 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, bahwa penentu keberhasilan KUPS sebanyak 96% adalah adanya kegiatan pendampingan sebagai penguat modal sosial di masyarakat

### Korelasi Peran KPHP dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan Terhadap Kinerja KPS dalam Mengelola Kawasan

Pengukuran peran KPHP Delta Mahakam dan efektivitas Penyuluh Kehutanan terhadap kinerja KPS setempat dalam mengelola kawasan hutan menggunakan variabel kinerja KPS dalam mengelola kawasan ke dalam 5 indikator yaitu batas wilayah kelola, aktivitas rehabilitasi, pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi, kesadaran kemauan dan kemampuan dalam pelestarian hutan, serta pencapaian pengelolaan hutan lestari.

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh 78 responden pada variabel kinerja KPS dalam mengelola

**Tabel 5** Koefisien korelasi dan koefisien determinasi instrumen variabel bebas peran KPH dan efektivitas penyuluh kehutanan serta variabel terikat kinerja KPS dalam mengelola kawasan klaster A

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.795 <sup>a</sup>	0.633	0.612	1.636

a. Predictors: (Constant), Total Efektiv Penyuluh, Total Peran KPH  
b. Dependent Variable: Total Kinerja KPS

Hasil perhitungan program *IBM SPSS Statistic 25* menunjukkan nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0.795, yang artinya hubungan variabel Peran KPH dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan dengan variabel kinerja KPS dalam mengelola kawasan klaster A adalah kuat. Selanjutnya hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai sebesar

kawasan diketahui bahwa secara umum jawaban responden klaster A menunjukkan Kinerja KPS Dalam Kelola Kawasan dipersepsikan positif. Hal ini dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang rata-rata memberikan tanggapan setuju, untuk tanggapan yang ragu-ragu dapat kita temukan hanya beberapa saja, sedangkan tanggapan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ditemukan. Jawaban responden klaster B menunjukkan Kinerja KPS Dalam Kelola Kawasan dipersepsikan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang rata-rata memberikan tanggapan ragu-ragu, kemudian disusul jawaban tidak setuju meski beberapa ada yang menanggapi setuju.

Berdasarkan Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Berganda Instrumen Variabel Peran KPH ( $X_1$ ), Efektivitas Penyuluh Kehutanan ( $X_2$ ) dan Kinerja KPS Dalam Kelola Kawasan ( $Y$ ) pada Klaster A, diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri dari peran KPH ( $X_1$ ) dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan ( $X_2$ ) menunjukkan nilai koefisien regresi positif, hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dengan arah positif atau hubungan searah dari variabel yang terdiri dari peran KPH ( $X_1$ ) dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan ( $X_2$ ) terhadap kinerja KPS dalam mengelola kawasan ( $Y$ ). Demikian pula pada Klaster B sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.

0.633. Hal ini menunjukkan bahwa 63.30% variasi dalam variabel kinerja KPS dalam mengelola Kawasan pada klaster A dijelaskan oleh variabel Peran KPH dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan. Sedangkan sisanya sebesar 36,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**Tabel 6.** Koefisien korelasi dan koefisien determinasi instrumen variabel bebas peran KPH dan efektivitas penyuluh kehutanan serta variabel terikat kinerja KPS dalam mengelola kawasan klaster B

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.535 <sup>a</sup>	0.286	0.247	2.242

a. Predictors: (Constant), Total Efektiv Penyuluh, Total Peran KPH  
b. Dependent Variable: Total Kinerja KPS

Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0.535, artinya hubungan variabel Peran KPH dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan dengan variabel kinerja KPS dalam kelola kawasan klaster B adalah cukup kuat. Selanjutnya hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai 0.286. Hal ini menunjukkan bahwa 28.60% variasi dalam variabel kinerja KPS klaster B dijelaskan oleh variabel Peran KPH dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan. Sedangkan sisanya sebesar 71,40% dipengaruhi variabel lain.

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk melihat apakah semua variabel-variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model

mempunyai pengaruh/signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

Hipotesis 3: *Terdapat korelasi positif antara peran KPHP Delta Mahakam dan efektifitas Penyuluh Kehutanan dengan kinerja KPS setempat dalam mengelola kawasan hutan.*

Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji statistic F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- 1) Jika signifikansi F menunjukkan nilai < 0,05, maka  $H_a$  diterima
- 2) Jika signifikansi F menunjukkan nilai > 0,05, maka  $H_a$  ditolak
- 3)

**Tabel 7.** Hasil perhitungan uji f instrumen variabel bebas peran KPH dan efektivitas penyuluh kehutanan terhadap variabel terikat kinerja KPS dalam kelola kawasan pada klaster A

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165.915	2	82.958	30.982	.000 <sup>b</sup>
	Residual	96.393	36	2.678		
	Total	262.308	38			

a. Dependent Variable: Total Kinerja KPS  
b. Predictors: (Constant), Total Efektiv Penyuluh, Total Peran KPH

Hasil perhitungan uji F sebagaimana Tabel 6 di atas diketahui bahwa semua variabel bebas (Peran KPH dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan) memiliki nilai sig. uji F  $0,000 < 0.05$  dan nilai F hitung sebesar  $30,982 > 3,25$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima yang

berarti variabel yang terdiri dari Peran KPH (X1) dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan (X2) berpengaruh langsung secara bersama-sama terhadap Kinerja KPS Dalam Dalam Kelola Kawasan (Y) pada Klaster A di wilayah KPHP Delta Mahakam.

**Tabel 7** Hasil perhitungan uji f instrumen variabel bebas peran KPH dan efektivitas penyuluh kehutanan terhadap variabel terikat kinerja KPS dalam kelola kawasan pada klaster B

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	72.593	2	36.297	7.219	.002 <sup>b</sup>
	Residual	180.996	36	5.028		
	Total	253.590	38			

a. Dependent Variable: Total Kinerja KPS  
b. Predictors: (Constant), Total Efektiv Penyuluh, Total Peran KPH

Sebagai pembandingan maka dilakukan juga perhitungan uji F pada klaster B (Tabel 7) dengan hasil bahwa semua variabel bebas (Peran KPH dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan) memiliki nilai sig. uji F  $0,002 < 0.05$  dan nilai F hitung sebesar  $7,219 > F$  Tabel (3,25), sehingga disimpulkan bahwa variabel yang terdiri dari Peran KPH dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan secara bersama-sama berpengaruh langsung terhadap Kinerja KPS Dalam Kelola Kawasan pada Klaster B.

Analisa hasil pengujian hipotesis dengan fakta di lapangan, bahwa Peran KPH dan Efektivitas Penyuluh Kehutanan secara simultan

bersama-bersama terlihat berpengaruh langsung pada kinerja KPS dalam kelola Kawasan yang tergabung dalam Klaster A maupun Klaster B.

Pendampingan yang dilaksanakan KPHP Delta Mahakam dan Penyuluh Kehutanan untuk peningkatan kinerja KPS yang memfokuskan pada aspek Kelola Kawasan dalam bentuk:

- a. Pemahaman terhadap batas wilayah kelola;

KPHP telah mengalokasikan anggaran pemetaan potensi dan tata ruang areal KPS serta fasilitasi penandaan batas secara partisipatif lebih kurang 13 unit KPS Klaster A yang tersebar di Kecamatan Muara Badak, Anggana

dan Muara Jawa. Penyuluh Kehutanan dan dibantu tenaga teknis pemetaan bersama-sama pengurus dan anggota KPS membahas permasalahan dan rencana penandaan batas, dan kemudian melaksanakan peninjauan lapangan sekaligus penandaan batas menggunakan patok kayu yang dicat dan ditempel plat nomor batas areal KPS. Luasnya areal KPS menyebabkan tidak semua lokasi dapat didampingi Penyuluh Kehutanan, oleh karenanya Penyuluh Kehutanan dibantu tenaga teknis memberikan pelatihan / kursus singkat pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya anggota yang sudah paham membantu anggota lainnya untuk juga melakukan pemetaan sederhana dan pemasangan patok batas. Demikian pula beberapa KPS dari 13 unit KPS yang tergabung dalam Klaster B juga telah mulai mendapatkan pendampingan pengembangan Perhutanan Sosial, meskipun intensitasnya tidak sebesar pendampingan terhadap KPS Klaster A.

- b. Aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan kritis/kosong/tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai);

Kegiatan penanaman di wilayah KPHP Delta Mahakam di dalam Kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan lebih banyak dilakukan pihak dari luar seperti UPT BPDASHL-Mahakam Berau, Yayasan Mangrove Lestari, Pertamina Foundation, BRGM, dan lainnya. Sedangkan KPHP Delta Mahakam sesuai kewenangannya dalam penggunaan DBHD DR melaksanakan penanaman di luar Kawasan hutan (APL). KPHP Delta Mahakam melalui Penyuluh Kehutanan selalu terlibat dalam aksi penanaman para pihak dikarenakan Penyuluh Kehutanan lebih memahami lokasi-lokasi yang potensial untuk kegiatan penanaman, serta juga lebih mengenal anggota KPS sehingga lebih dipercaya untuk mendukung kegiatan penanaman yang diinisiasi dari pihak luar.

- c. Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi;

Dalam proses penyusunan RKPS dan RKT didahului dengan kegiatan pengenalan potensi wilayah dan daya dukungnya oleh anggota KPS. Penyuluh Kehutanan mendampingi KPS untuk menginisiasi anggota saling berbagi informasi tentang potensi di wilayahnya serta berani menyampaikan gagasan / ide terkait pengembangan usaha produktif KPS. Misalnya kegiatan di Klaster A oleh KTH Sinar Abab Sejahtera dan KTH Sinar Abab Mandiri yang berlokasi di wilayah administrasi Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana, dimana Penyuluh memfasilitasi penyusunan desain tapak yang

didalamnya memuat perencanaan zonasi pemanfaatan areal KPS yaitu zona pemanfaatan sawah pasang surut, zona perikanan, zona ekowisata dan bahkan zona budidaya ternak. Bahkan di tahun 2022 KPHP Delta Mahakam telah bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dalam hal menyiapkan pra-syarat pengembangan ekowisata di areal KPS melalui studi kelayakan dan pemetaan potensi di beberapa wilayah KPS.

- d. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam pelestarian hutan dan konservasi sumber daya alam;

Tupoksi KPHP Delta Mahakam dalam perlindungan hutan melalui satuan Polisi Kehutanan telah melaksanakan patroli pengamanan dengan melibatkan Penyuluh Kehutanan dan Tenaga Teknis Kehutanan serta kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA), dan juga dibantu anggota Babinsa, Bhabinkamtibmas. KPHP Delta Mahakam juga memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota KPS sebagai garda terdepan dalam menjaga Kawasan hutan Delta Mahakam.

- e. Pencapaian pengelolaan hutan lestari antara lain perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari.

Menjadi PR KPH untuk merubah pola pikir masyarakat (petambak) bahwa keberadaan tambak di dalam Kawasan hutan merupakan usaha yang ilegal dan seyogyanya harus dilakukan proses legalisasi melalui mekanisme hukum yang mengakui akses Kelola masyarakat di dalam kawasan hutan, diantaranya melalui Perhutanan Sosial sebagai bagian dari penataan Kawasan hutan.

Masih adanya persepsi negatif dari sebagian petani tambak yang menganggap keberadaan mangrove sebagai pengganggu terhadap produktivitas tambak tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi KPH dan Penyuluh Kehutanan untuk menyadarkan mereka bahwa justru dengan keberadaan mangrove akan menambah produktivitas dan kualitas hasil tambak, seperti yang dipraktekkan beberapa KPS antara lain KTH Ramah Lingkungan Salo Sumbala Kecamatan Muara Badak, KTH Alam Lestari di Desa Sepatin Kecamatan Anggana dan lainnya.

Sebanyak 2 (dua) unit KPS yang masuk dalam klaster A secara berturut-turut berhasil memperoleh pengakuan yaitu KTH Delta Mahakam Kecamatan Muara Jawa sebagai Terbaik III pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2021 Kategori Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, dan KTH Ramah

Lingkungan Salo Sumbala Kecamatan Muara Badak sebagai Terbaik III Wana Lestari Tingkat Nasional Kategori Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan Tahun 2022.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sedalam-dalamnya diucapkan kepada Kepala KPHP Delta Mahakam yang telah menerima dan mengizinkan serta memfasilitasi penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pengurus Kelompok Perhutanan Sosial yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, L., Ichsan, A. C., & Webliana, K. (2021). Analisis Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Waku Lani Desa Lenek Duren Dan Desa Toya Lombok Timur. *Jurnal Sylva Scientiae*
- Fitria, W., Suharjito, D., & Ekawati, S. (2021). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Implementasi Perhutanan Sosial: Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 18(2), 145–160.
- Hakim, I., Irawanti, S., Murniati, Sumarhani, Widiarti, A., Effendi, R., Muslich, M., & Rulliaty, S. (2010). Social forestry: menuju restorasi pembangunan kehutanan berkelanjutan.
- Hardianto, D., Sufyadi, D., & Suharjadinata. (2020). Hubungan Antara Kinerja Penyuluh Kehutanan Dengan Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat. *Agribusiness System Scientific Journal*, 1(1), 1–8.
- Iskandar, Almutahar, H., & Sabran, M. (2013). Kajian Sosiologis Terhadap Peran Penyuluhan Kehutanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN*, 1–26.
- Istiqomah, Udiansyah, & Hamdani Fauzi. (2021). Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pemegang Izin Perhutanan Sosial di Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayutangi. 04(3), 440–451.
- Mutaqin, D. J., Wahyuni, I., & Rahayu, H. (2022). Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi. *Bappenas Working Papers*, V(2), 159–175.
- Pergub\_Kaltim\_39. (2019). Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 0541, 1–69.
- Pergub\_Kaltim\_69. (2016). Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 69 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Permenhut\_4. (2022). Peraturan Menteri LHK RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. Presiden RI.
- Permenhut\_89. (2018). Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan. 1151.
- Permenhut\_9. (2021). Peraturan Menteri LHK RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1–268.
- PP\_23. (2021). Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Presiden Republik Indonesia.
- Sampe, M. S. (2014). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai UPT Perpustakaan Universitas Hasannuddin. *Jupiter*, 13(2), 22–25.
- Santoso, S., Nurrochmat, D., Nugroho, B., & Santoso, I. (2019). Keberterimaan Kelompok Tani Hutan pada Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di KPH Yogyakarta dan KPH Wilayah IX Panyabungan. *Jurnal Penyuluhan*, 15(2), 169–183.
- Sardjono, M. A., Devung, S., Imang, N. 2013. *Local Community Dimension of Indonesian Forest Policy and Customary Land Tenure in East Kalimantan. Paper presented at the Paper presented at the IASC conferences, Mount Fuji, Japan.*
- Syamsu, J. A. (2011). Reposisi paradigma pengembangan peternakan (M. Arief (ed.)). Absolute Media.
- Tejada, J. J., Raymond, J., & Punzalan, B. (2012). *On the Misuse of Slovin's Formula. The Philippine Statistician*, 61(1), 8.
- Tsauri, S. (2014). Manajemen Kinerja. In STAIN Jember Press.
- Wahyuni, T. (2021). *Strengthening Role and Policy of Local Government in Accelerating Development of Social Forestry in East Kalimantan. Proceedings of the Joint Symposium on Tropical Studies (JSTS-19)*, 11, 382–387.
- Wahyuni, T., Wiati, C. B., & Nouval, B. (2020).

- Peluang Kemitraan Kehutanan Untuk Mendukung Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan Pada KHDTK/HPP Di Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 6(2), 117–130.
- Wijaya, B., Fauzi, H., & Hafizianor, H. (2020). Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scientiae*, 3(1), 62–74.
- Wulandari, C. (2019). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial oleh Mitra. *Talenta Conference Series: Agricultural and Natural Resources (ANR)*, 2(1)
- Tantawi Yahya, Abdul Azis Ramli. (2021). Peran Penyuluh Kehutanan Terhadap Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan di Kecamatan Tidore. *Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 5 Edisi Desember 20*